

Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota

Vol. 19, No. 1, 2023, 64 - 76

P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597-9272 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index

PARIWISATA RAMAH DISABILITAS: PRAKTIK DI KOTA BANDUNG DAN SEKITARNYA

DISABILITY FRIENDLY TOURISM: PRACTICES IN BANDUNG CITY AND SURROUNDING AREAS

Gina Puspitasari Rochmana*, Afiati Afiatia, Riswandha Risang Ajia, Ernady Syaodiha

^aProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung; Bandung

*Korespondensi:: gina.puspitasari@unisba.ac.id

Info Artikel:

• Artikel Masuk: 11 Agustus 2021

• Artikel diterima: 11 Mei 2022

• Tersedia Online: 31 Maret 2023

ABSTRAK

Indonesia memiliki banyak destinasi wisata dan penyandang disabilitas kerap menghadapi keterbatasan akses berwisata. Studi empiris mengenai pariwisata ramah disabilitas juga masih terbatas di Indonesia. Studi ini bertujuan mengindentifikasi sejauh mana praktik pariwisata ramah disabilitas di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Ketiga wilayah ini memiliki ragam wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, agrowisata, dan wisata belanja. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode analisis isi terhadap hasil wawancara, dokumen, hasil studi dan regulasi terkait. Sebanyak 15 informan kunci diwawancara dan 10 destinasi wisata di tiga wilayah tersebut diobservasi. Pariwisata ramah disabilitas menekankan aksesibilitas terhadap atraksi wisata sehingga penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dan tujuannya berwisata tanpa khawatir. Studi ini berfokus pada eksplorasi penerapan wisata ramah dengan menekankan pada faktor atraksi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan layanan tambahan. Studi ini menyimpulkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di Kota Bandung dan sekitarnya belum ramah disabilitas. Fasilitas dan layanan masih bersifat universal dan beberapa diantaranya memudahkan disabilitas berwisata, seperti tersedianya jalur pedestrian dan pintu masuk yang lebar. Namun, klasifikasi raba dengar, jalur pemandu, kepekaan terhadap disabilitas dan keterampilan komunikasi dari pekerja wisata, dan media visual interaktif belum tersedia. Pengelola wisata dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah belum memperhatikan kebutuhan fasilitas dan layanan berdasarkan tipe disabilitas yang mana membutuhkan fasilitas dan layanan yang berbeda dalam berwisata.

Kata Kunci: Wisata Ramah, Disabilitas, Aksesibilitas, Fasilitas, Layanan

ABSTRACT

Indonesia has many tourist destinations and people with disabilities often face limited access to travel. Empirical studies on disability-friendly tourism are also still limited in Indonesia. This study aims to identify the extent of disability-friendly tourism practices in Bandung City, West Bandung Regency, and Bandung Regency. These three areas have a variety of tourism, such as nature tourism, cultural tourism, agro-tourism, and city tourism. This study uses a qualitative research approach and content analysis methods on the results of interviews, documents, study results and related regulations. A total of 15 key informants were interviewed and 10 tourist destinations in the three regions were observed. Disability-friendly tourism emphasizes accessibility to tourist attractions so that people with disabilities can fulfill their needs and travel goals without worry. This study explores the application of friendly tourism by emphasizing the factors of attraction, accessibility, supporting facilities, and additional services. This study concludes that most tourist destinations in the city of Bandung and its surroundings are not yet disability friendly. Infrastructure and facilities are still universal and some of them make it easier for people with disabilities to travel, such as the availability of pedestrian paths and wide entrances. However, the classification of hearing touch, guide path, sensitivity to disability and communication skills of tourism workers, and interactive visual media is not yet available. Tourism managers and policies issued by local governments have not paid attention to the need for infrastructure and facilities based on the type of disability whose infrastructure and facilities needs are different in traveling.

Keyword: Friendly Tourism, Disability, Accessibility, Facility, Service

Copyright © 2023 GJGP-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata masih menjadi andalan perekonomian di Indonesia. Banyak daerah tengah mengoptimalkan potensi wilayahnya sebagai bagian dari kegiatan wisata, tetapi belum semua orang dapat menikmatinya. Berdasarkan data World Healt Organization (WHO) dan International Labour Organization (ILO) (Arie, 2017), penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia atau lebih dari satu miliar orang dari jumlah penduduk dunia dan sekitar 10 persen dari penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas kerap kali menghadapi keterbatasan akses bukan hanya akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak, tapi juga pariwisata. Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Right of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 menjamin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempattempat rekreasi, hiburan, dan pariwisata (lihat UU, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, telah banyak diskursus internasional mengenai konsep pariwisata yang mengedepankan kesetaraan atau keadilan bagi penyandang disabilitas, diantaranya konsep pariwisata ramah atau friendly-tourism (Anuar et al., 2012; Aris Anuar et al, 2016; Zakiyah & Husein, 2016), accessible tourism (Gandin, 2017), dan pariwisata berkelanjutan yang mempromosikan inklusivitas. Intinya, konsep-konsep tersebut menekankan perlunya akses ke tempat wisata melalui serangkaian layanan dan fasilitas yang memungkinkan orang dengan berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) untuk menikmati liburan dan waktu luang mereka tanpa hambatan (Lovelock & Lovelock, 2013).

Wisata ramah merupakan konsep yang memberikan kepuasan tersendiri untuk memenuhi permintaan dan penawaran wisatawan melalui penggunaan maksimum aktivitas, produk, dan ruang (Anuar et al., 2012). Sementara itu, pariwisata ramah disabilitas merupakan perjalanan yang dilakukan para disabilitas untuk bersenang-senang dan belajar selain dari tempat asalnya dengan didukung oleh aksesibilitas yang sesuai dengan kriterianya (Anuar et al., 2012; Anuar et al., 2016; Zakiyah & Husein, 2016). Objek wisata yang bisa dijangkau oleh siapapun wisatawannya dan sesuai dengan harapan dan ekspektasi merupakan dasar pariwisata (Biernacka & Kronenberg, 2018). Selain itu, pengaturan desain objek wisata yang memperhatikan wisatawan berkebutuhan khusus merupakan hal dasar yang harus dipenuhi oleh objek wisata agar menjadi inklusif (Nurbalqis & Nurini, 2016). Pariwisata inklusif memperhatikan wisatawan berkebutuhan khusus melalui pemenuhan dasar-dasar pariwisata yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan atraktif. Desain dasar yang perlu ditempatkan dalam setiap objek wisata harus bersifat universal. Beberapa contoh fasilitas yang universal antara lain pintu masuk kursi roda dan pegangan tangan untuk tipe disabilitas fisik, lantai taktil atau jalur khusus difabel (Pradani & Nurini, 2020) beserta peta dan petunjuk untuk tipe disabilitas indera/sensor, serta petunjuk dan pos kesehatan mental yang bisa diakses siapapun dan kapanpun untuk tipe disabilitas mental (Subramanian & Jana, 2018). Selain hal-hal khusus seperti di atas, objek wisata juga harus memperhatikan amenitas yang ada agar wisatawan berkebutuhan khusus bisa menggunakan amenitas tersebut. Amenitas universal bisa dimulai dari penyediaan pintu masuk kursi roda, toilet difabel, hingga tempat parkir khusus difabel (Gillovic & McIntosh, 2015).

Para disabilitas memiliki kebutuhan bersenang–senang yang sama dengan masyarakat lainnya, tapi seringkali menghadapi keterbatasan dalam aksesibilitasnya. Menurut Zakiyah dkk (2017), pariwisata ramah disabilitas memperhatikan bagaimana kualitas pelayanan dapat mengerti kebutuhan difabel serta kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas yang ramah bagi difabel. Selanjutnya, wisata ramah disabilitas juga memperhatikan ketersediaan informasi terkait atraksi wisata agar difabel dapat menentukan atraksi wisata dan dapat mengerti informasi yang disampaikan. Banyak destinasi wisata belum memperhatikan aksesibilitas yang ramah bagi disabilitas karena masih adanya kesulitan dalam mengakses situasi lingkungan seperti jangkauan jarak jauh, naik tangga, mengambil atau memindahkan objek tertentu (Elfrida & Noviyanti, 2019). Hal mendasar ini kerap tidak didapatkan oleh wisatawan disabilitas (berkebutuhan khusus), baik disabilitas fisik, indera/sensor, dan mental. Masing-masing jenis disabilitas memiliki kebutuhan fasilitas pendukung yang berbeda-beda. Fasilitas pendukung untuk disabilitas fisik bisa berupa *caddy car* atau penyewaan kursi roda; untuk disabilitas indera/sensor bisa berupa *tour guide* yang menggunakan bahasa

isyarat, tour guide yang menggunakan audio khusus, dan peta braille; untuk disabilitas mental bisa berupa program khusus dan aktivitas yang sudah diadaptasi di objek wisata (Natalia et al., 2019).

Dorongan penyandang disabilitas berwisata bukan hanya dari perspektif sosial, tapi juga ekonomi. Jumlah penyandang disabilitas diperkirakan akan terus bertambah karena meningkatnya tingkat penuaan populasi (Lovelock & Lovelock, 2013; Small & Darcy, 2011). Kondisi ini memberikan peluang pasar yang menguntungkan bagi operator wisata untuk mampu dan mau menyelenggarakan liburan bagi pengunjung penyandang disabilitas, pengasuhnya, keluarga, dan teman mereka. Disabilitas cenderung melakukan perjalanan lebih sering selama musim sepi, biasanya ditemani atau dalam kelompok, dan melakukan banyak kunjungan kembali (Chain, 2016). Penyediaan akses wisata bagi disabilitas penting mendapat perhatian Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki banyak destinasi wisata. Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, rangkaian kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penyediaan fasilitas dan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang lain yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja, tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis, dan tujuan lainnya (WTO, 2016). Kepentingan ekonomi, kebudayaan, sosial, kesehatan, agama, politik, kesehatan, maupun kepentingan lainnya yang sekedar ingin tahu, belajar dan menambah pengalaman mendorong kepergiaan seseorang melakukan perjalanan (Pranata, 2012).

Diskursus internasional telah banyak mengkaji mengenai konsep pariwisata ramah (Anuar et al., 2016; Gandin, 2017; Lovelock & Lovelock, 2013; Small & Darcy, 2011; Zakiyah & Husein, 2016), baik itu wisata ramah muslim, wisata ramah disabilitas, wisata yang mudah diakses, dan sebagainya. Di Indonesia, penelitian sebelumnya yang terkait telah mengkaji pada aksesibilitas penyandang disabilitas (Aprilesti & Syaodih, 2019; Utami, Raharjo, & Dan, 2018) tetapi belum mengkaji aksesibilitas tersebut dalam kegiatan berwisata. Studi oleh Utami (2018) menunjukan bahwa aksesibilitas bangunan institusi belum mencapai sempurna sesuai dengan standar yang ada bagi tuna daksa, baik berdasarkan asas aksesibilitas; keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Sementara studi oleh Aprilesti (2019) menunjukkan bahwa kinerja taman berdasarkan persepsi penyandang disabilitas secara umum masih kurang atau dibawah 50 persen, kecuali fasilitas pedestrian. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik wisata ramah bagi penyandang disabilitas dengan menjadikan destinasi wisata di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat sebagai fokus studi. Ketiga wilayah ini memiliki ragam wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, agrowisata, dan wisata kota. Praktik wisata ramah disabilitas mengkaji mengenai 4 (empat) komponen utama di dalam pariwisata, meliputi: atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan pelayanan (Isdarmanto, 2017; Suwena & Widyatmaja, 2017). Hasil penelitian ini memperkaya literatur–literatur mengenai pengembangan pariwisata, studi inklusifitas, dan kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan hasil evaluasi dan menjadi referensi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, baik pemerintah di tingkat nasional, wilayah, maupun lokal.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengindentifikasi sejauh mana praktik wisata ramah disabilitas pada destinasi wisata di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Ketiga wilayah ini memiliki ragam wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, agrowisata, dan wisata kota. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif-deskriptif (Sugiyono, 2015) dan menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis dan mengeksplorasi pengalaman berwisata penyandang disabilitas di Bandung dan sekitarnya. Metode analisis isi dilakukan terhadap hasil wawancara, dokumen, hasil studi dan regulasi terkait. Sebelum dilakukan analisis, data direduksi, kemudian menganalisis pola dan keterkaitan antar data, selanjutnya ditarik kesimpulan. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap informan kunci.

Informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2015) dengan kriteria pemilihan informan, yakni penyandang disabilitas, baik netra, rungu, dan daksa yang pernah berwisata di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, aktor yang memiliki peran

di sektor inklusi, baik dari komunitas sosial maupun pemerintah daerah, dan pengelola wisata. Tuna netra merupakan seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan, baik buta total (totally blind) maupun kemampuan melihat amat rendah (low vision), tuna rungu merupakan keadaan seseorang yang tidak dapat menangkap berbagai ransangan khususnya pada pendengarannya baik tuli (deaf) maupun pendengaran kurang (low of hearing) sehingga membutuhkan alat maupun tanpa alat bantu dengar, sedangkan tuna daksa merupakan keadaan seseorang yang mengalami kerusakan akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi yang dapat diakibatkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga bawaan sejak lahir (PU, 2006). Sebanyak 15 (lima belas) informan kunci diwawancara, meliputi: tuna daksa, tuna rungu, tuna netra dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Bandung, Dinas Pemerintah Kota Bandung, pengelola wisata, dan pendamping tuna daksa. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring. Selain itu, sebanyak 10 (sepuluh) destinasi wisata di tiga wilayah tersebut diobservasi, meliputi Farmhouse, The Great Asia Afrika, Lembang Zoo, Floating Market, The Lodge Maribaya, Begonia Gardens, Fairy Garden, Bandung Zoo, The Kings, and Situ Patenggang. Observasi dilakukan sebagai bagian dari proses triangulasi data dalam penelitian kualitatif (Taguchi, 2018).

Praktik wisata ramah dianalisis berdasarkan 4 (empat) komponen utama pariwisata, meliputi: atraksi, aksesibilitas, fasilitas/amenitas, dan pelayanan tambahan/anciliary (Isdarmanto, 2017; Suwena & Widyatmaja, 2017). Variabel penelitian mengenai aksesibilitas dan fasilitas mengidentifikasi mengenai ketersediaan, kualitas, dan kebutuhan fasilitas dan layanan. Fasilitas yang dimaksud mencakup area parkir, pintu, tangga, lift, ramp, rambu/marka, toilet, jalur pedestrian, jalur pemandu, visual, dan klarifikasi raba dengar. Sementara itu, layanan yang dimaksud mencakup pelayanan informasi, pemandu wisata/pendamping, dan pelayanan khusus. Kriteria fasilitas inklusif diantaranya fasilitas toilet dilengkapi dengan wastafel khusus, emergency sound button, dilengkapi handrail; jalur pemandu menggunakan tekstur ubin garis-garis, pewarnaan ubin pemandu berwarna kuning/jingga; terdapat rambu marka dengan audio tunarungu, fasilitas teletext dan tv bagi tunarungu, dan rambu/merka menggunakan huruf braile (Elfrida & Noviyanti, 2019; Hasanuddin, 2019; Simanjuntak et al., 2018) Identifikasi wisata ramah juga melihat kesesuaian praktik dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dijadikan referensi utama adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Variabel dan kriteria tersebut menjadi dasar dalam mengindetifikasi sejauh mana penerapan/praktinya di destinasi wisata di Kota Bandung dan sekitarnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Destinasi Wisata dan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung dan Sekitarnya

Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki banyak destinasi wisata yang beragam dari mulai wisata alam, wisata seni budaya, wisata belanja, wisata kuliner, dan wisata edukasi. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1, destinasi wisata di Kota Bandung meliputi: Kebun Binatang Bandung (wisata edukasi) dan The Kings (wisata belanja), selanjutnya destinasi wisata di Kabupaten Bandung, yakni Situ Patenggang (wisata alam), dan destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat, meliputi: Farm House (wisata edukasi), Great Asia Afrika (wisata edukasi), Lembang Zoo (wisata edukasi), Floating Market (wisata kuliner dan edukasi), Kebun Begonia (wisata edukasi), Fairy Garden (wisata kuliner), dan The Lodge Maribaya (wisata alam). Destinasi wisata tersebut memiliki jumlah pengunjung yang cukup banyak dibandingan dengan lokasi wisata lainnya dengan jumlah pengunjung pertahun dari The Great Asia Afrika 500.757 jiwa, Farm House 271.554 jiwa, floating market 304.888 jiwa, kebun begonia 72.639, The Lodge 91.442 jiwa, Fairy Garden 179.137 jiwa, Lembang Zoo 276.903, kebun binatang 107.800 jiwa, The Kings 480.000 jiwa juga salah satu wisata buatan yang memiliki letak strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan alun-alun Kota Bandung dan Situ Patenggang 96.323 jiwa. Selain itu, destinasi wisata Fairy Garden merupakan salah satu destinasi wisata ramah difabel di Indonesia (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021).

Secara umum, destinasi wisata di Kota Bandung yang menjadi lokasi studi menawarkan atraksi berupa edukasi mengenai binatang dan kegiatan belanja juga hiburan perkotaan. Sementara destinasi

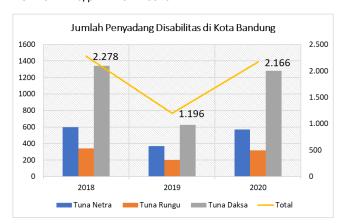
wisata di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi lokasi studi menawarkan atraksi berupa menikmati makanan tradisional, menikmati suasana perkebunan dan pertanian, kegiatan edukasi mengenai binatang dan tanaman, kegiatan kemping dan menikmati suasana alam, menikmati suasana kota buatan dan desain bangunan yang menarik untuk menjadi spot foto. Destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi lokasi studi menawarkan suasana dan kegiatan alam, seperti melintasi danau menggunakan perahu. Semua destinasi tersebut menjadi lokasi yang pernah dikunjungi oleh penyandang disabilitas yang menjadi informan kunci dalam studi ini.

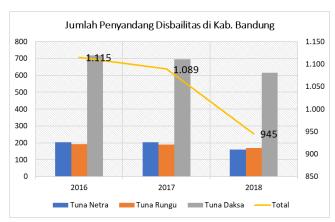


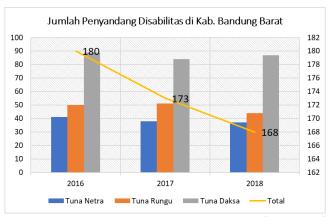
Gambar 1. Sebaran 10 (Sepuluh) Destinasi Wisata di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat

Perkembangan jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandung cenderung fluktuatif selama 3 tahun terakhir, sedangkan di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat cenderung mengalami penurunan pada tahun 2016-2018, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. Jenis disabilitas terbanyak baik di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat adalah tuna daksa. Secara umum, Kota Bandung memiliki jumlah penyandang disabilitas yang terbanyak dibandingkan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung. Jumlah penyandang disabilitas mengalami kenaikan dan penurunan, dan dipengaruhi oleh kejadian sakit, kecelakaan, kematian, kelahiran, dan kesembuhan. Meskipun cenderung mengalami penurunan, jumlah penyandang disabilitas masih tinggi. Dengan demikian, wisata ramah bagi penyandang disabilitas seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan pengelola wisata di Kota Bandung dan sekitarnya.

DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640









Sumber: opendata.jabarprov.go.id **Gambar 2.** Jumlah Penyandang Disabilitas
di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat

Praktik wisata ramah bagi penyandang disabilitas diidentifikasi berdasarkan komponen atraksi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan pelayanan/keramah tamahan. Penyandang disabilitas dalam studi ini meliputi: tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa. Pada bagian selanjutnya dijelaskan mengenai sejauh mana praktik wisata ramah pada destinasi wisata di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Praktik Wisata Ramah Disabilitas di Kota Bandung dan Sekitarnya

3.2.1 Atraksi

Wisata ramah berdasarkan persepsi penyandang disabilitas dilihat dari bagaimana suatu lokasi wisata dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam melakukan perjalanan wisata. Pada akhirnya, suatu tempat atau tujuan wisata tersebut dapat menarik wisatawan untuk datang dan memuaskan beberapa permintaan wisatawan misalnya keindahan alam, iklim, budaya, sejarah, dan lain sebagainya (Spillane, 1994). Dalam hal ini, penyandang disabilitas dapat menikmati atraksi wisata yang disediakan. Penyandang tuna netra, meskipun memiliki keterbatasan visual, mereka menikmati atraksi wisata yang sifatnya dapat mereka dengar atau sentuh, seperti kutipan wawancara dengan informan berikut ini:

"... suka menikmati suasana sekitar seperti suara ngobrol, suara air menikmati udara segar, indah suasananya belum terlalu rame udah asik banget terus ya gimana ya seneng banget lah..." (Tuna Netra A, 2021).

Rochman, Afiati, Aji, dan Syaodih/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 19, No. 1, 2023, 64-76 DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640

Atraksi yang dihadirkan, seperti mendengar suara air, hewan, menyentuh air, dan sebagainya. Namun, atraksi tersebut dapat dinikmati mereka ketika lokasi wisata tersebut tidak ramai pengunjung atau tidak bising, serta mendapatkan panduan pelayanan dari pihak pengelola wisata mengenai penggunaan fasilitas–fasilitas yang tersedia sehingga mereka bisa mengakses/menikmati atraksi/wahana yang disediakan.

Berbeda dengan penyandang tuna netra, penyandang tuna rungu dapat mengakses beragam jenis atraksi wisata. Mereka dapat menikmati atraksi visual (pemandangan) dan atraksi yang menuntut mobilitas dan kekuatan fisik secara mandiri (seperti menaiki wahana tertentu). Sebagaimana kutipan wawancara dengan informan berikut ini:

"...jalan-jalan, lihat-lihat, selfie, naik perahu, atau seperti wahana permainan ulil di Kings Shopping Center ..." (Tuna Rungu A, 2021).

Kondisi ini berbeda bagi penyandang tuna daksa. Mereka cenderung hanya bisa menikmati pemandangan atau memilih melihat atraksi-atraksi yang disediakan di lokasi wisata tersebut. Adanya kekhawatiran mereka ketika mereka akan menikmati langsung atraksi/wahana yang tersedia. Kondisi ini juga menunjukan kemungkinan tidak memadainya fasilitas pendukung sehingga mereka memilih hanya melihat saja. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

"... kalau naik atraksi takut jatuh, nikmatin pemandangan aja..." (Tuna Daksa A, 2021)

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa beragam jenis atraksi wisata baik visual maupun non-visual, lebih dapat dinikmati penyandang tuna rungu secara mandiri, dibandingkan tuna netra dan tuna daksa. Tetapi, tuna netra dan tuna daksa juga berpeluang untuk menikmati atraksi tersebut dengan beberapa ketentuan, diantaranya tidak ramai pengunjung sehingga suasana atau kondisinya lebih sunyi, adanya pendamping atau staf yang memandu, serta fasilitas pendukung yang memadai dan dikhususkan bagi penyandang disabilitas.

3.3 Aksesibilitas

Kemudahan mencapai destinasi wisata menjadi nilai kepuasan dari wisatawan (Hasanuddin, 2019). Dala studi ini, aksesibilitas berfokus pada akses di dalam lokasi wisata, seperti akses kendaraan, parkir, pintu masuk, tangga, dan lift. Kemudahan mengakses atraksi wisata sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas fisik, terutama bagi tuna daksa, sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut ini:

"... Nah sebenarnya kalau dari segi aksesibilitas, itu yang paling banyak membutuhkan itu sebenarnya tuna daksa. Ya kan? Karena tuna daksa yang membutuhkan fasilitas lebih banyak. Kalau tuna netra ya naik tangga bisa, ya kan? Nah kemudian dia biarpun dituntun kalau gak dituntun kalau pake tongkat bisa. Nah jadi yang memerlukan standar aksesibilitas itu lebih banyak kepada tuna daksa. Karna tuna daksa memerlukan jalan miring, jalan rel yakan. Posisi rodanya supaya bisa lewat. Cuman yang jadi tantangan dia ya dia gak bisa kesana karna gak ada jalan kursi rodanya. Kalau kita meskipun tidak bisa liat kemana-mana, tapi kita bisa jalan kemana-mana. Artinya kita bisa diantar oleh guide atau keluarga kita keliling semua tempat wisata itu kita bisa jalanin, ikutin. Mau tangga kayak apakpun. Tapi kita tidak bisa mendeskripsikan, tidak bisa membayangkan, menggambambarkan apa yang ada disana dari segi penglihatan. Kecuali kita mendapatkan deskripsi apa yang ada disana..." (Tuna Netra B -YPAC, 2021).

Aksesibilitas fisik lebih dibutuhkan bagi penyandang disabilitas daksa dibandingkan tuna Netra maupun rungu. Aksesibilitas tuna rungu tertinggi karena Sebagian besar destinasi wisata sudah menyediakan teks maupun rambu berupa informasi mengenai atraksi maupun fasilitas yang disediakan di lokasi wisata,

meskipun juga terbatas, seperti dapat dilihat pada Gambar 3. Aksesibilitas fisik pada umumnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra dan rungu hanya saja perlu pendamping atau tanda khusus akan tetapi untuk penyandang disabilitas daksa dibutuhkan aksesibilitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi partisipatif dengan tuna netra, seluruh lokasi wisata yang dikunjungi belum ada fasilitas klasifikasi raba dengar dan jalur pemandu khusus berwarna kuning bagi disabilitas hanya saja ada jalur pedestrian universal yang dapat juga digunakan oleh tuna netra akan tetapi membutuhkan pendamping untuk mengarahkan jalannya. Pendampingan dibutuhkan jika destinasi wisata tersebut baru pertama kali dikunjungi oleh penyandang tuna netra tersebut. Kondisi tersebut sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut ini:

"... jalur pemandu werwarna kuning perlu ada di lokasi wisata karena kadang kita ingin jalan sendiri dan selalu bawa tongkat sendiri..." (Tuna Netra A, 2021).

Sementara itu, tuna netra membutuhkan membutuhkan replika raba dengar untuk dapat mengakses dan menikmati atraksi wisata. Meskipun sudah dijelaskan suasa baik itu dari kerabat, karyawan atau keluarga, mereka dapat berimajinasi jika meraba apa yang mereka ingin tahu. Maka dari itu, atraksi wisata yang disediakan lebih dapat dinikmati jika ada replika yang menyerupai dan dapat dipegang tanpa harus merusak atraksi ataupun menyakiti hewan. Aksesibilitas dan fasilitas ini yang berlum dijelaskan oleh studi sebelumnya (Elfrida & Noviyanti, 2019; Natalia et al., 2019). Replika ini dilengkapi fasilitas modifikasi untuk membuat ukuran objek menjadi besar dan sebaliknya. Hal ini bertujuan agar penyandang tuna netra dapat meraba dan membayangkan bentuk asli dari objek tersebut. Dalam mengakses atraksi wisata, penyandang disabilitas tuna Netra juga membutuhkan pemandu untuk mengarahkan jalan dan menginformasikan keadaan sekitar yang dalam waktu bersamaan kebutuhan wisatanya akan terpenuhi. Dengan demikian, bagi tuna Netra, aksesibilitas terhadap atraksi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas klarifikasi raba dengar dan jalur pemandu yang disediakan di lokasi wisata.

"... kadang-kadang perabaan itu ga bisa detail kita. Sebenarnya kalau bisa, bunga yang asli itu ada yang plastiknya sehingga agak keras jadi kalau di raba-raba ngga akan rusak. Karna kalau yang aslinya kita pegang kita raba-raba akan rusak. Jadi ada bagusnya di tempat wisata itu disamping, ya apakah disampingnya atau dimananya ya secara estetika terserah. Tapi ada yang plastiknya. Karna kalau ada palsunya itu kita kalau ngeraba bentuknya itu bebas. Kita bisa menikmati..." (Tuna Netra B - YPAC, 2021)

Aksesibilitas tuna rungu dalam menikmat atraksi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan rambu atau marka yang dapat menjelaskan setiap petunjuk arah yang ada di lokasi wisata tersebut. Fasilitas tersebut memudahkan tuna netra menjangkau dan menikmati atraksi wisata tanpa kendala. Rambu atau marka tersebut dilengkapi teks atau gambar yang membantunya untuk mengetahui syarat atau cara mengakses atraksi wisata. Selain itu, tuna rungu membutuhkan alat komunikasi, seperti papan tulis ataupun layer/media visual lainnya sehingga memudahkan tuna rungu untuk berkomunikasi di lokasi wisata. Kondisi ini sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut ini:

"... kalau untuk lokasi wisata dibutuhkan dan bisa dibantu dengan teks atau papantulis untuk komunikasi juga harus ada tanda-tanda untuk difabel tuli, sama harus ada informasi darurat untuk difabel tuli..." (Tuna Rungu B, 2021).

Dengan demikian, berbeda dengan tuna netra, tuna rungu memiliki aksesibilitas yang lebih baik. Tanpa pendamping, tuna rungu dapat mengakses atraksi wisata secara mandiri. Aksesibilitas tuna rungu dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, diantaranya papan tulis, layar visual sebagai alat komunikasi, rambu atau tanda penunjuk arah, dan tanda darurat. Selain sebagai media informasi dan alat komunikasi, fasilitas

Rochman, Afiati, Aji, dan Syaodih/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 19, No. 1, 2023, 64-76 DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640

berbentuk media visual dibutuhkan sebagai media edukasi dan interaktif yang menjelaskan mengenai atraksi wisata.

Bagi tuna daksa, aksesibilitas terhadap atraksi wisata dipengaruhi ketersediaan area yang luas, dataran atau jalan yang landai dan dilengkapi ramp untuk menuju atraksi yang datarannya menaik. Destinasi wisata belum menyediakan ramp di semua lokasi wisata. Meskipun begitu, tuna daksa dapat menggunakan jalur pedestrian yang tersedia. Selain itu, jalur evakuasi, rambu, dan kursi roda bagi tuna daksa juga penting. Hasil observasi menunjukan ketersediaan fasilitas kursi roda di lokasi wisata, seperti Kebun Binatang Bandung, Kings, dan The Great Asia Afrika. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan, serta fasilitas fisik mempengaruhi akses tuna daksa terhadap atraksi wisata.

Secara singkat, penyandang disabilitas, baik tuna Netra, tuna rungu, dan tuna daksa memiliki akses yang terbatas terhadap atraksi wisata di sebagian besar destinasi wisata di Kota Bandung dan sekitarnya. Setiap jenis penyandang disabilitas memerlukan fasilitas tertentu untuk mengakses dan menikmati atraksi wisata. Fasilitas tersebut berbeda bagi setiap jenis penyandang disabilitas. Informasi mengenai atraksi wisata di lokasi wisata memudahkan dan mengoptimalkan wisatawan untuk dapat menikmati atraksi dan mencapai tujuan berwisata. Informasi ini penting sebagai pengalaman atau wawasan yang wisatawan ingat atau dibawa pulang setelah melakukan aktivitas wisata. Begitu juga bagi wisatawan penyandang disabilitas. Informasi yang tersedia di lokasi wisata dan akses untuk mendapatkan informasi bagi penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa berbeda. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas seperti klasifikasi raba dengar, replikasi atraksi wisata, jalur pemandu, media visual interaktif, kursi roda, dan jalan landai mampu meningkatkan akses dan memenuhi tujuan penyandang disabilitas berwisata. Berkaitan dengan itu, diskusi pengelola wisata dan pemerintah bersama penyandang disabilitas dibutuhkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengembangan destinasi dan atraksi wisata.

3.4 Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung membantu penyandang disabilitas berwisata lebih nyaman melalui ketersediaan fasilitas, seperti toilet, kantin, penginapan, dan sebagainya (Isdarmanto, 2017; Suwena & Widyatmaja, 2017). Penyandang disabiltas, terutama tuna daksa membutuhkan toilet khusus yang luas dan disertai pegangan khusus. Destinasi wisata yang menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Farm House, Kebun Binatang Bandung, dan Lembang Zoo yang sudah menyediakan area toilet yang luas, meskipun hanya Farm House yang dilengkapi dengan pegangan/penyangga, seperti dapat dilihat pada Gambar 3. Kondisi ini berpengaruh pada kenyamanan penyandang disabilitas, sebagaimana dinyatakan informan berikut ini.

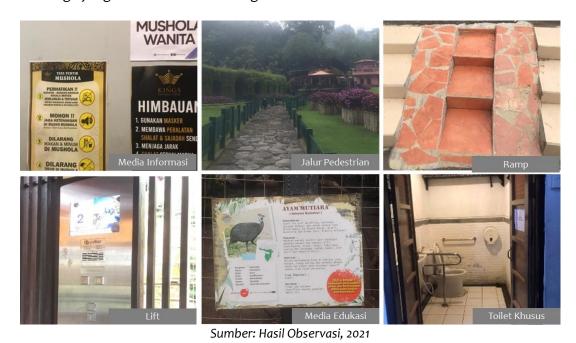
"... Oh kalau kayak ke toilet harusnya ada sih jadi biar mempermudah yang ngedorong gitu kaya yang difabel harus dibedakan dengan toilet orang biasa ya harusnya kaya ada jalur tersendirinya. Kalau toilet buat yang difabel itu harusnya ada yang kaya kursi khusus yang ada rodanya gitu jadi biar bisa ditinggal gitu kalau misalnya ke toilet kan gak mungkin ditungguin ya. Takut lama gitu jadi ya kalau itu kan ada pegangannya gitu jadi ya kursi aman buat kita..." (Tuna Daksa B dan C, 2021)

Selanjutnya, fasilitas inklusif yang penting tersedia bagi penyandang disabilitas adalah pemandu wisata (Elfrida & Noviyanti, 2019; Hasanuddin, 2019). Penyandang tuna netra mendapatkan informasi dari keluarga atau teman yang mengajaknya melakukan perjalanan wisata. Namun, informasi yang didapatkan juga terbatas. Selain memang keluarga atau teman tersebut juga memiliki keterbatasan informasi, mereka juga sama–sama sedang menikmati atraksi wisata. Dengan demikian, peran dari pemandu khusus yang kompeten dari lokasi wisata penting sebagai sarana komunikasi dan informasi interaktif. Sebagaimana kutipan wawancara dengan penyandang disabilitas netra berikut ini:

"... Kalau soal pemandangan ya tuna netra yang dibutuhkan ditempat wisata itu ya guide wisata yang bisa menceritakan suasana disana. Kita butuh itu. Kadang kadang keluarga

kita juga gak cukup waktu dan gak mampu untuk menjelaskan apa yang ada di sana. Memang diperlukan di tempat wisata itu untuk tuna netra perlu guide wisata itu membawa kita untuk menceritakan apa yang ada ..." (Tuna Netra B, 2021)

Sarana komunikasi dan informasi interaktif melalui ketersediaan pendamping dan pemandu khusus yang kompeten bagi penyandang disabilitas tuna netra sangat penting, terutama khusus bagi penyandang tuna netra. Kompetensi yang dimaksud yaitu kemampuan menuntun dan mengilustrasikan objek/atraksi yang bisa dinikmati, baik ilustrasi visual dan suara. Misalnya menjelaskan kondisi dan objek mulai dari warna bunga, jenis hewan, suara hewan, suara danau, bentuk perahu, serta menuntuk cara menaiki tangga, saat melewati jembatan bambu dan lain sebagainya. Sementara itu, media informasi fisik di lokasi wisata menjadi sarana utama bagi disabilitas tuna rungu melakukan aktivitas wisata, diantaranya rambu, petunjuk arah, maupun media infomasi visual yang disediakan oleh pengelola wisata. Tuna rungu mendapatkan informasi dan edukasi mengenai atraksi wisata dan fasilitas yang tersedia dengan melihat tanda, penujuk arah yang sudah tersedia di lokasi wisata. Selain itu, informasi mengenai cara penggunaan fasilitas, seperti toilet yang dilengkapi dengan teknologi tertentu, dibutuhkan oleh tuna rungu. Informasi berupa teks tersedia di beberapa destinasi wisata, seperti Kebun Binatang Bandung. Informasi ini memberikan pengetahuan mengenai satwa di lokasi tersebut. Sementara itu, tuna daksa dan tuna netra mendapatkan informasi dan edukasi mengenai atraksi wisata melalui pendamping yang turut berwisata. Tuna netra biasanya didampingi oleh rekan yang penglihatannya juga terbatas, tapi masih bisa melihat. Tuna daksa biasanya didampingi oleh rekan dan keluarga yang membantu mendorong kursi roda.



Gambar 3. Aksesibilitas dan Fasilitas Pada Destinasi Wisata di Kota Bandung dan Sekitarnya

Secara singkat, penyandang disabilitas masih belum bisa menikmati atraksi wisata dengan nyaman dan puas. Fasilitas pendukung masih universal dan belum sesuai kebutuhan mereka. Menikmati dan mendapatkan pengalaman maupun informasi mengenai atraksi wisata belum dapat dilakukan secara mandiri. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendukung, seperti media informasi visual dan sarana komunikasi dan informasi yang interaktif.

DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640

3.5 Pelayanan Tambahan

Pelayanan pada destinasi wisata menjelaskan daya tanggap dan kemampuan khusus karyawan dalam melihat kebutuhan dan kondisi wisatawan penyandang disabilitas (Isdarmanto, 2017; Simanjuntak et al., 2018). Pemandu atau pendamping wisata yang disediakan oleh pengelola dibutuhkan bagi penyandang disabilitas, terutama bagi tuna netra total. Bagi tuna netra yang tergabung dalam sebuah komunitas tuna netra, mereka biasanya berwisata bersama dengan tuna netra dengan low vision (sedikit bisa melihat) yang dapat mendampingi tuna netra total saat berwisata. Daya tanggap karyawan maupun pekerja kegiatan pendukung (seperti restoran, pedagang) di dalam lokasi wisata memang sangat dibutuhkan, terutama bagi tuna rungu yang berwisata tanpa ditemani dengan pendamping baik itu keluarga atau kerabat. Tanggap yang dimaksud adalah merespon kebutuhan/permintaan tuna rungu melalui berkomunikasi atau berbicara pelan atau lebih baik memiliki kemampuan berbahasa isyarat. Kebutuhan ini berhubungan dengan pelayanan seperti memesan tiket, memesan makan, dan komunikasi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut ini:

- "...iya pasti ada kendala tetap harus membutuhkan orang lain kan membutuhkan pendamping contoh misalnya kami kemarin dari grup PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) ke Cibedai kan kalau tanpa pendamping meskipun kita nyewa transport juga tidak bisa kan apalagi menuju medan baru tidak hapal tetap saja tetap harus didampingi supaya ada yang melihat ..." (Tuna Netra C, 2021)
- "... Kadang kadang keluarga kita juga gak cukup waktu dan gak mampu untuk menjelaskan apa yang ada disana. Memang di perlukan di tempat wisata itu untuk tuna netra perlu guide wisata itu membawa kita untuk menceritakan apa yang ada disana..." (Tuna Netra A, 2021)

Selanjutnya, pelayanan bagi penyandang disabilitas tuna rungu membutuhkan kesabaran. Berdasarkan hasil observasi langsung dengan tuna rungu ke The Kings Shopping Center, pelayanan tidak memuaskan karena karyawan tidak memahami keinginan disabilitas rungu ketika memesan makanan. Kondisi ini dapat diatasi apabila penyedia jasa menyediakan media atau papan untuk menulis sehingga memfasilitasi komunikasi antara disabilitas rungu dan penyedia jasa. Sementara itu, pelayanan tambahan bagi penyandang daksa berupa bantuan untuk mendorong kursi roda minimal dari parkir sampai pintu masuk. Sehubungan dengan itu, pengetahuan dasar mengenai bagaimana cara mendorong kursi roda, rem dan lain sebagainya penting diketahui karyawan untuk membantu penyandang daksa dengan kursi roda yang datang ke lokasi tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh informan berikut ini:

"... gak jarang juga kalau misalnya karyawannya itu gak tau caranya kan dari tim kita suka ngajarin "jadi gini caranya mas" gitukan suka diajarin juga. Kitakan manggungnya itu suka takut kadang-kadang mahasiswanya juga harus diajarin sama tim kita caranya gimana gitu. Iya jadi biar kitanya gak jatoh biar aman ..." (Tuna Daksa B, 2021)

Berdasarkan pengalaman peneliti bersama penyandang daksa berwisata, destinasi wisata Lembang Zoo memiliki pelayanan yang ramah dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas tuna daksa. Pegawai tanggap terlihat dalam membantu membuka pintu masuk khusus untuk kursi roda, menunjukan jalan-jalan yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas daksa berkursi roda. Jika dalam beberapa lokasi yang tidak ada *lift* maka diperlukan ketanggapan dari karyawan untuk dapat membantu menggendong ataupun membawakan kursi roda tersebut karena jika naik eskalator, tangga, ataupun dataran yang curam biasanya penyandang disabilitas akan digendong dan kursi roda terpisah karena keselamatan merupakan hal utama dalam melakukan setiap kegiatan.

Secara umum, pelayanan mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan penyandang disabilitas dalam berwisata. Pelayanan tersebut meliputi daya tanggap pegawai terhadap kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas, pengetahuan pegawai, dan keterampilan komunikasi pegawai. Sebagian besar destinasi wisata di Kota Bandung dan sekitarnya belum memiliki pelayanan yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas dalam berwisata.

4 KESIMPULAN

Wisata ramah disabilitas menekankan pada kemampuan suatu destinasi wisata suatu lokasi wisata untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam melakukan perjalanan wisata. Wisata ramah disabilitas mudah diakses dan dinikmati tanpa kekhawatiran. Studi ini menyimpulkan bahwa beragam alternatif atraksi wisata penting, tetapi perlu adanya modifikasi dan pemanfaatan teknologi sehingga atraksi tersebut dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Hal ini tidak lepas dari adanya ketersediaan fasilitas pendukung dan pelayanan sehingga akses untuk menikmati atraksi wisata terpenuhi dan meningkat. Fasilitas pendukung yang sifatnya fisik sangat penting bagi penyandang tuna daksa, sedangkan pelayanan sangat penting bagi penyandang tuna netra. Sementara itu, sarana informasi visual dan komunikasi interaktif sangat penting bagi penyandang tuna rungu untuk berwisata secara mandiri. Ketersediaan jalur pemandu dan klarifikasi raba dengar (miniature dan audio) mengenai atraksi wisata strategis bagi peningkatan aksesibilitas wisata penyandang disabilitas. Selain itu, kenyamanan berwisata dapat ditingkatkan melalui penyediaan papan tulis dan layar visual sebagai alat komunikasi, rambu atau tanda penunjuk arah, dan tanda darurat. Selanjutnya, fasilitas seperti toilet khusus difabel serta alat duduk di toilet khusus, ramp, kemiringan landai, pintu masuk yang lebar, jalur pedestrian, dan parkir khusus disabilitas secara umum masih perlu ditingkatkan. Klasifikasi dan replika raba dengar menstimulus penyandang disabilitas berimajinasi dan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan. Maka dari itu, atraksi wisata yang disediakan lebih dapat dinikmati jika ada replika yang menyerupai dan dapat dipegang tanpa harus merusak atraksi. Sementara itu, studi ini menyimpulkan terdapat 2 (dua) destinasi wisata di Kota Bandung dan sekitarnya yang ramah disabilitas yaitu Farm House dan Fairy Garden. Keramahan tersebut ditunjukan melalui kemudahan akses terhadap atraksi wisata dan kelengkapan fasilitas bagi penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya. Namun, pengetahuan pihak pengelola mengenai kebutuhan dari penyandang disabilitas dalam berwisata masih terbatas. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan pengelola wisata masih bersifat universal dan belum menyesuaikan kebutuhan setiap jenis penyandang disabilitas. Dengan demikian, studi ini merekomendasikan peningkatan fasilitas dan pelayanan destinasi wisata melalui pemanfaatan teknologi dan penyediaan sarana prasarana khusus penyandang disabilitas, serta komitmen dari pengelola wisata dan pemerintah daerah untuk mendorong penerapan wisata ramah disabilitas. Berkaitan dengan itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan atau regulasi berupa insentif dan disinsentif yang berimplikasi pada perizinan pembukaan dan pengembangan destinasi wisata.

5 PERNYATAAN RESMI

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Bandung telah membiayai penelitian ini.

6 REFERENSI

Anuar, A. N. A., Ahmad, H., Jusoh, H., & Hussain, M. Y. (2012). The roles of tourism system towards development of tourist friendly destination concept. *Asian Social Science*, 8(6), 146–155.

Aprilesti, L. P., & Syaodih, E. (2019). Persepsi Penyandang Disabilitas Terhadap Taman (Studi Kasus Taman Inklusi dan Taman Lalu Lintas, Kota Bandung) Perceptions of Disabilities about Parks (Study Case Inklusi Park and Lalu Lintas Park Bandung City) Pendahuluan Kota Bandung merupakan sala. 4(2).

Arie, P. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum, 1, 1-4.

Anuar, A. N. A., Ahmad, H., Jusoh, H., & Hussain, M. Y. (2016). A Preliminary Study of Tourist Friendly Destination

Rochman, Afiati, Aji, dan Syaodih/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 19, No. 1, 2023, 64-76 DOI: 10.14710/pwk.v19i1.40640

Concept in City Tourism. Journal of Hotel & Business Management, 05(02), 2–5.

Biernacka, M., & Kronenberg, J. (2018). Classification of institutional barriers affecting the availability, accessibility and attractiveness of urban green spaces. *Urban Forestry and Urban Greening*, 36(August), 22–33.

Chain, A. (2016). Tourism for All-promoting universal accessibility.

Elfrida, T., & Noviyanti, U. D. E. (2019). Difa City Tour dan Pemenuhan Kebutuhan Wisata Difabel. Inklusi, 6(1), 25.

Gandin, S. (2017). Tourism Promotion and Disability. 55-73.

Gillovic, B., & McIntosh, A. (2015). Stakeholder perspectives of the future of accessible tourism in New Zealand. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 223–239.

Hasanuddin, M. (2019). Analisis Fasilitas Pariwisata di Museum Angkut Kota Batu Bagi Pengunjung Penyandang Disabilitas. 72(2), 138–147.

Isdarmanto. (2017). Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Wisata.

Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2021). Destinasi Wisata Ramah Difabel Di Indonesia.

Lovelock, B., & Lovelock, K. (2013). The ethics of tourism: Critical and applied perspectives.

Natalia, P., Clara, R. A., Simon, D., Noelia, G., & Barbara, A. (2019). Critical elements in accessible tourism for destination competitiveness and comparison: Principal component analysis from Oceania and South America. *Tourism Management*, 75(April), 169–185.

Nurbalqis, O., & Nurini. (2016). Arahan Perancangan Taman Kota Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik di Kecamatan Kota Juang. Ruang, 2(3), 207–215.

Pradani, S. W., & Nurini. (2020). Perilaku Masyarakat di Ruang Terbuka Publik Alun- Alun Kabupaten Blora. TATA LOKA, 22(1), 50–60.

Pranata, Y. (2012). Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Motivasi Wisatawan Domestik untuk Berkunjung ke Taman Wisata Tirta Alam Cibinong - Sagalaherang, Kabupaten Subang. 7–21.

PU. Permen PU No 30 Tahun 2006., (2006).

Simanjuntak, C., Leli Kusuma Dewi, L. G., & Susrami Dewi, N. G. A. (2018). Penyediaan Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas Oleh Stakeholder Di Kotamadya Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal IPTA*, 6(1), 55.

Small, J., & Darcy, S. (2011). 1 Tourism, Disability and Mobility. (2010), 1–20.

Spillane, J. J. (1994). Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan.

Subramanian, D., & Jana, A. (2018). Urban Forestry & Urban Greening Assessing urban recreational open spaces for the elderly: A case of three Indian cities. *Urban Forestry & Urban Greening*, 35(August), 115–128.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV. Alfabeta.

Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2017). Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata.

Taguchi, N. (2018). Description and explanation of pragmatic development: Quantitative, qualitative, and mixed methods research. *System*, 75, 23–32.

Utami, E., Raharjo, S., & Dan, N. A. (2018). Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa. Jurnal. Unpad. Ac. Id.

UU. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas., Free § (2011).

WTO. (2016). World Tourism Day 2016: "Tourism for All – promoting universal accessibility" – Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain. In World Tourism Day 2016: "Tourism for All – promoting universal accessibility" – Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain.

Zakiyah, U., & Husein, R. (2016). Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 482–505.

Zakiyah, U., Husein, R., & Muzwardi, A. (2017). Pelayanan Inklusif Untuk Penyandang Disabilitas Studi Fasilitas. (April).